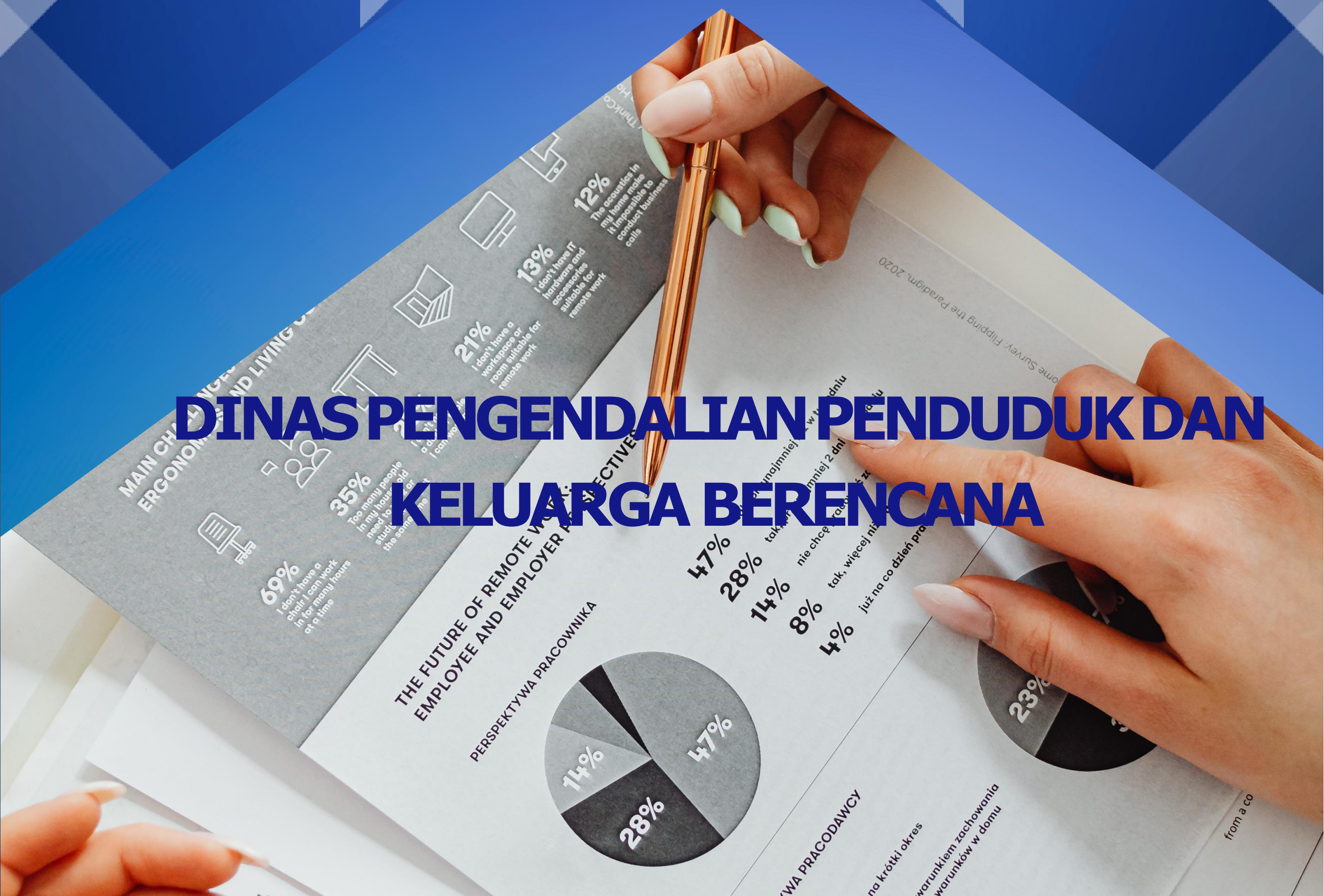




LAPORAN EVALUASI KINERJA T W IV TAHUN 2025

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sekaligus Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2025 disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan semua kegiatan yang dibebankan kepada OPD dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur, yang juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong good governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam Upaya Pengendalian Penduduk dan Pencapaian Keluarga Berencana yang optimal Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2025 ini merupakan kegiatan yang juga merupakan evaluasi gambaran kegiatan serta realisasi penggunaan anggaran sesuai dengan rencana kas pada Triwulan IV Tahun 2025. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2025.



Mallu, Januari 2026
Kepala DPPKB Luwu Timur

AMRULLAH S.Pd, M.M

Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 196706061989031010

BAB 1

PENDAHULUAN

Peningkatan akuntabilitas publik para penyelenggara negara khususnya eksekutif pemerintahan, pada dasarnya merupakan prasyarat mendasar bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, yang bersih dan yang bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sistem dan mekanisme yang dapat diterapkan dalam rangka mewujudkan yang baik adalah sistem akuntabilitas instansi pemerintah. Sistem ini merupakan Langkah-langkah reformasi yang telah diterapkan untuk peningkatan akuntabilitas public dalam penyelenggaraan negara. Sebagai dukungan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (good governance) dengan menjadikan akuntabilitas publik sebagai landasan maka diperlukan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi triwulan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur. Laporan ini merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatannya dan pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Bidang dan Kewenangan

Bidang dan kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah;

LAPORAN EVALUASI TRIWULAN IV 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

- 2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

3.1 Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

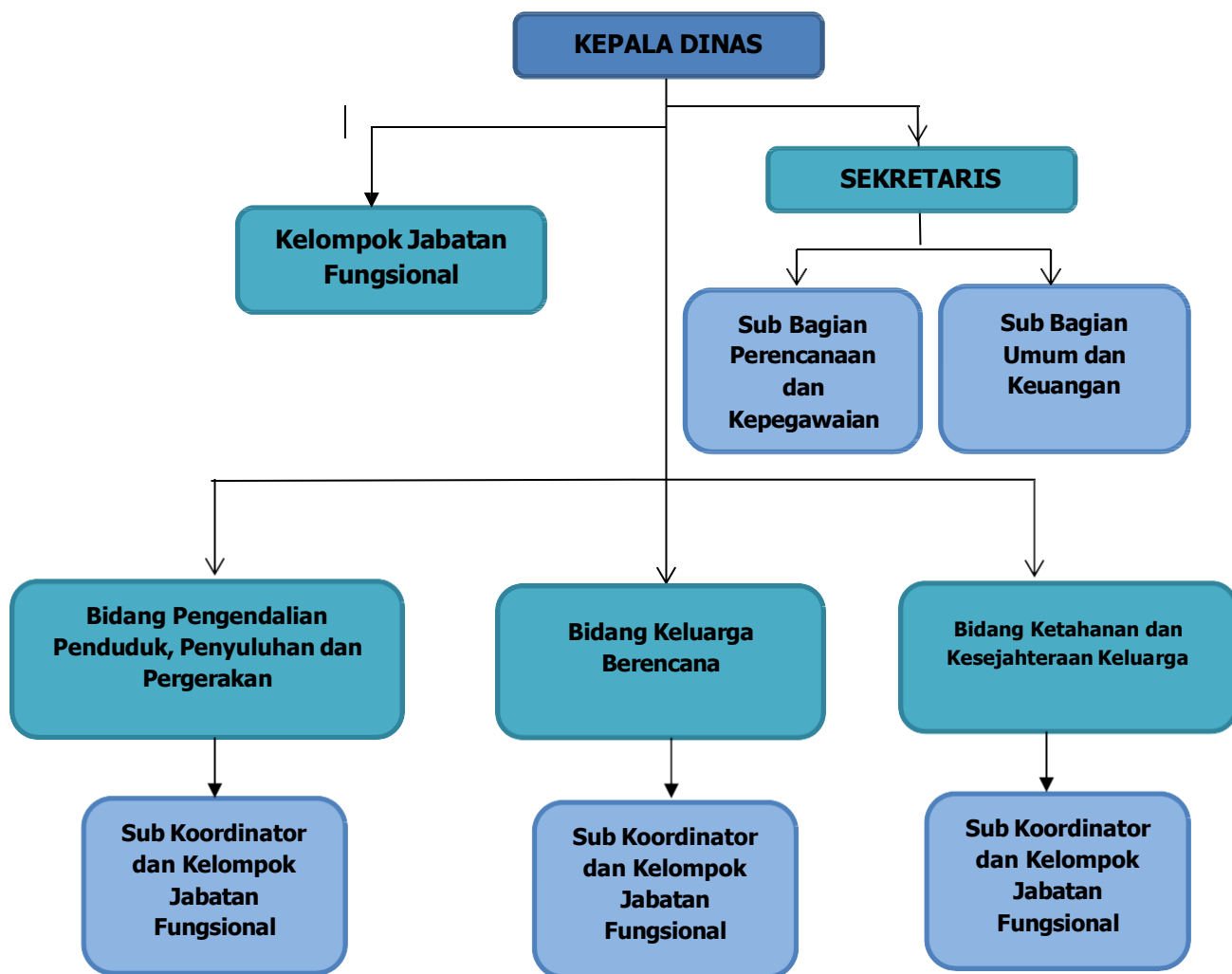
4. Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 64 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat Lembaga teknis yang menangani khusus untuk Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk dengan rincian sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- c) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, dengan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- d) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, dengan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- e) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, dengan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

1. VISI DAN MISI

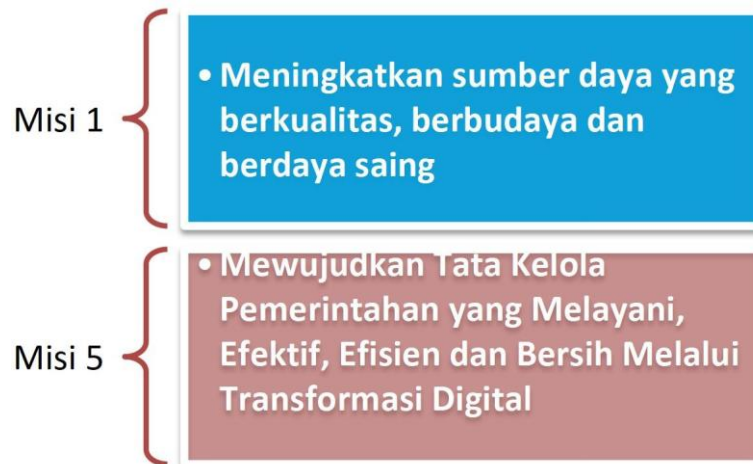
1.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2025 – 2029 yaitu :

“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”

1.2 Misi

Misi merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan agar apa yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan visi mencapai 2 (dua) tujuan dalam waktu 5 (lima) tahun adalah meningkatkan penduduk yang berkualitas dan meningkatkan penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah. Hal ini sejalan dengan misi yang ingin dicapai Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2021-2026 yang mengacu pada :



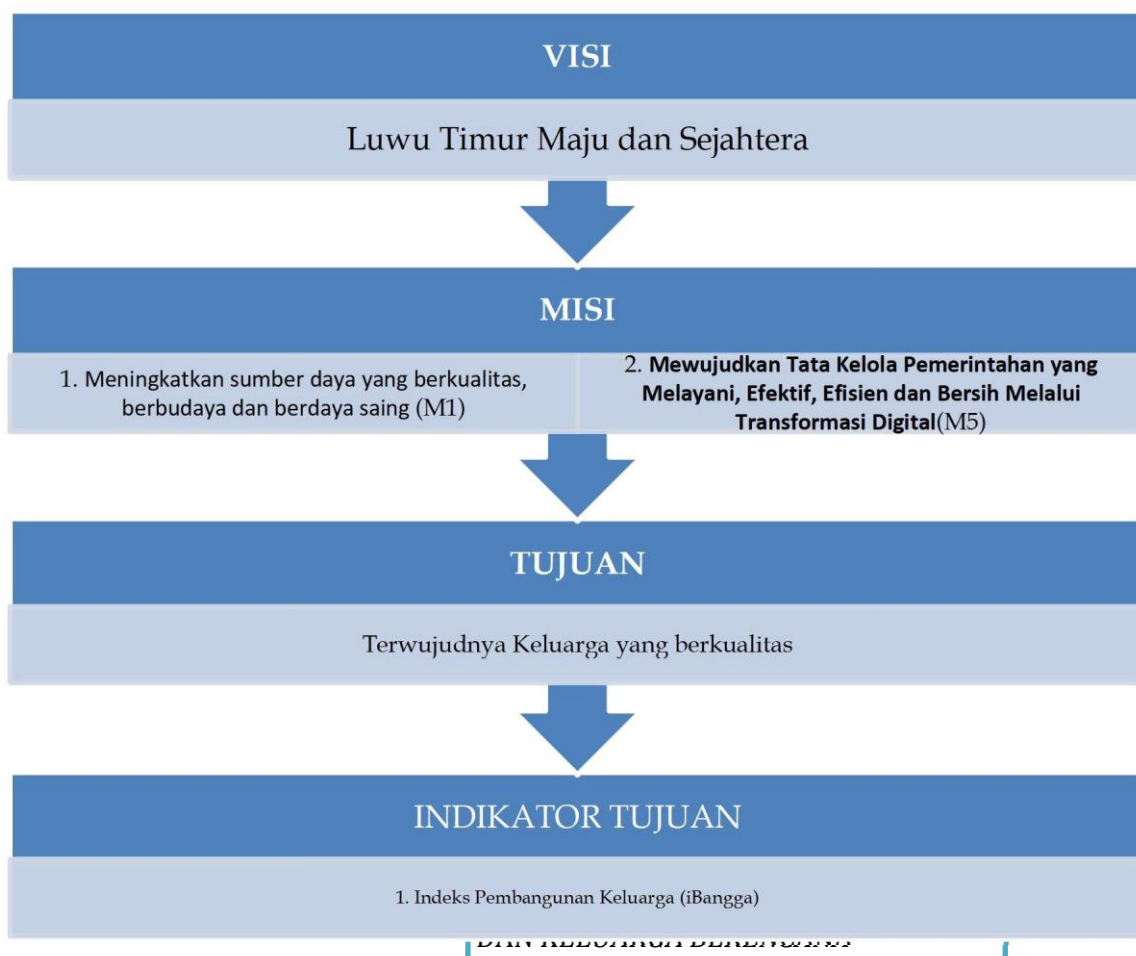
2. TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu. Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat mewujudkan sesuatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang yang dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif dan diupayakan terfokus pada kostumer. Tujuan memiliki 3 karekteristik yaitu idealistik, jangkauan ke depan dan abstrak. Berdasarkan hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur menetapkan tujuannya sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 – 2029



2.2 Sasaran

Tujuan tersebut diatas diharapkan dapat mencapai beberapa sasaran organisasi. Sasaran organisasi ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaian dapat diukur dengan jelas. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui Tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat, terinci, dapat diukur dan dicapai. Berdasarkan hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur menetapkan sasaran sebagai berikut :

Berikut ini adalah sasaran dan indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dokumen Renstra periode Tahun 2025-2029 (sebelum dilakukan perubahan mengacu pada Inmen Nomor 2 Tahun 2025).

Tabel 2.2
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SASARAN	SAT	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
TUJUAN 1: Terwujudnya Keluarga yang berkualitas								
SASARAN 1: Meningkatnya Usia Kawin Pertama								
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		%	66.1	66.9	67.7	68.5	69.3	70.1
	Rata Usia kawin Pertama	Usia	21	21	21	21	21	21
SASARAN 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah								
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	72	73	74	75	76	77

2.3 Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama. Dimana setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur terhadap capaian kinerja yang dilakukan

Tabel 2

Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Usia Kawin Pertama	Rata-Rata Usia Kawin Pertama	Tahun	$\text{Rata-Rata Usia Kawin Pertama (UKP)} = \frac{\sum (\text{Usia saat menikah pertama})}{\text{Jumlah wanita yang menikah}}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembilang = total usia (dalam tahun) wanita saat menikah pertama kali • Penyebut = jumlah wanita usia 10 tahun ke atas yang pernah menikah 	BPS/SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional)	<p>Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan</p> <p>Bidang Keluarga Berencana.</p> <p>Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p>

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	$\text{Nilai AKIP} = \frac{\text{Jumlah skor hasil evaluasi implementasi SAKIP}}{\text{Skor maksimum}} \times 100$ <p>Kategori Penilaian AKIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AA (Sangat Memuaskan) (90 – 100)= Akuntabilitas sangat tinggi, sistem berjalan optimal dan hasil kinerja sangat baik; • A (Memuaskan) (80 – 89,99)= Akuntabilitas tinggi, sebagian besar komponen telah berjalan efektif; • BB (Baik Sekali) (70 – 79,99)= Akuntabilitas baik, sistem kinerja berjalan dengan baik dan terukur ; • B (Baik) (60 – 69,99)= Akuntabilitas cukup baik, masih perlu penyempurnaan di beberapa aspek; • CC (Cukup) (50 – 59,99)= Akuntabilitas sedang, implementasi SAKIP belum konsisten; • C (Kurang) (30 – 49,99)= Akuntabilitas rendah, sistem belum 	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretariat

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
				berjalan efektif; • D (Sangat Kurang)(< 30)= Akuntabilitas sangat rendah, hampir seluruh aspek belum diterapkan.		

Penjelasan Kineja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Usia Kawin Pertama adalah menggambarkan keberhasilan program pembangunan keluarga, khususnya dalam mendorong remaja untuk menunda usia pernikahan hingga usia matang secara fisik, mental, emosional, dan sosial, yaitu minimal 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Indikator ini mencerminkan:

- Penurunan angka perkawinan usia anak (di bawah 19 tahun)
- Peningkatan kesadaran remaja dan orang tua terhadap pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga
- Dukungan lingkungan dan kebijakan daerah dalam mencegah praktik pernikahan dini

Peningkatan usia kawin pertama memiliki dampak langsung terhadap:

- Kesehatan ibu dan anak
- Pencegahan stunting
- Kesempatan pendidikan dan karier bagi remaja
- Pengendalian laju pertumbuhan penduduk

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- **Pasal 7 Ayat (1):** Usia minimal perkawinan adalah **19 tahun** bagi laki-laki maupun perempuan.
- Tujuan perubahan ini adalah untuk melindungi hak anak dan mencegah praktik perkawinan usia dini.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009

tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

- **Pasal 20 dan 21:** Mengamanatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, termasuk penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021

tentang Percepatan Penurunan Stunting

- Menekankan pentingnya intervensi sensitif, salah satunya adalah **pencegahan perkawinan usia anak**, yang sangat terkait dengan peningkatan usia kawin pertama.

Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2019

tentang Rencana Aksi Nasional Program Bangga Kencana

- Menyebutkan secara eksplisit strategi peningkatan usia kawin pertama sebagai bagian dari program penguatan ketahanan remaja dan pembangunan keluarga berkualitas.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002)

- **Pasal 26 Ayat (1) huruf c:** Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Rata-rata usia kawin pertama	Ukuran rata-rata umur individu, khususnya perempuan, saat pertama kali melangsungkan perkawinan sah menurut hukum dan adat yang berlaku	Menggambarkan keberhasilan intervensi dalam menunda usia perkawinan, yang berdampak pada kesehatan reproduksi, pendidikan, ketahanan keluarga, dan penurunan stunting.	Jumlah (umur kawin pertama wanita x jumlah Wanita menurut usia kawin pertama)/ Jumlah wanita menurut usia kawin pertama	<ul style="list-style-type: none"> - Survei Penduduk Antar (SUPAS) - Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) - Data SIGA BKKBN - Survei Daerah/Lokal BKKBN

Sasaran II :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

- c Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan

yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah, maka penyelenggaraan urusan perangkat daerah harus didasari oleh Tugas Pokok dan Fungsi OPD. Pelaksanaannya harus ditunjang dengan adanya program/kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan perkantoran dan keberlangsungan aktivitas perkantoran serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik maka perlu dilakukan peningkatan kualitas maupun kinerja dari perangkat daerah. Dan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik maka harus berpedoman sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014.

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan	Formula/Rumus	Sumber data
NILAI AKIP Perangkat Daerah	Adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari system perencanaan, sistem penganggaran dan system pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan system akuntabilitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat daerah merupakan salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Nilai AKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.	NILAI AKIP Hasil LHE Inspektorat	Laporan Kinerja DPPKB & LHE Inspektorat

2.4 RENCANA KINERJA OPD

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, diperlukan rencana kinerja yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan.

2.5 Perencanaan Kinerja

Pada tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja ini ditetapkan menjadi perjanjian kinerja yang merupakan perwujudan komitmen antara Bupati selaku pemberi amanah kepada Kepala OPD selaku penerima amanah. Dalam setiap perjanjian kinerja yang dibuat, telah ditetapkan indikator yang terukur. Salah satu tujuan dari perjanjian kinerja ini adalah sebagai tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja OPD.

Sesuai hasil pendampingan dari Kemenpan dimana berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam penyusunan kinerja harus dimulai dengan penetapan sasaran kinerja yang ingin dicapai OPD (Outcome) dan selanjutnya mengidentifikasi faktor penyebab dan kondisi yang diperlukan (CSF) dan menguraikan CSF tersebut atau hal-hal yang dapat mendukung untuk pencapaian sasaran OPD tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan penyusunan Perjanjian kinerja yang berbasis kinerja (Pohon Kinerja). Penyusunan PK 2025 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan Renstra, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025, IKU dan anggaran.

Adapun perjanjian kinerja tahun 2025 yang dibuat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur (Eselon II)

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Usia kawin Pertama	Rata-Rata Usia Kawin Pertama	21
2	Meningkatnya kualitas dan pencaipan kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rd. 3.846.469.726	PAD, DAU
Program Pengendalian Penduduk	Rp. 420.389.550	PAD, DAK
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 4.204.211.500	PAD, DAK

LAPORAN EVALUASI TRIWULAN IV 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera(KS)	Rp.	2.281.555.000	PAD, DAK
TOTAL ANGGARAN 2025	Rp.	10.467.090.484	

2.6 Rencana Anggaran Tahun 2025

Dalam pelaksanaan IKU (Indikator Kinerja Utama) DPPKB, rencana strategis serta program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun anggaran 2025 harus didukung dengan Anggaran APBD Perubahan Kabupaten Luwu Timur untuk belanja sebesar **Rp 10.467.090.484,-** (Sepuluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) yang bersumber dari Dana Non Fisik sebesar **Rp. 4.499.775.000** BOKB, dan PAD sebesar **Rp. 6.834.928.371,-**

Adapun anggaran tersebut dirinci berdasarkan program, secara lengkap anggaran tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4
Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025

No	Program	Pagu Anggaran	keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp. 3.846.469.726,-	PAD dan DAU
2	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 420.389.550,-	PAD dan DAK
3	Program Pembinaan dan Keluarga Berencana	Rp. 4.204.211.500,-	PAD dan DAK
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Rp. 1.996.019.708,-	PAD dan DAK

BAB 3**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pelaporan berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, laporan ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah masyarakat di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan. Laporan akuntabilitas kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.

A. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber

daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALIASI s.d TW IV	%
1	Meningkatnya Usia Kawin Pertama	Rata-Rata Usia kawin Pertama	21	22.5	107,14
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akip Perangkat Daerah	72	71.30	99

Hasil pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 diuraikan sasaran per sasaran strategis berikut indikator kinerjanya masing-masing. Penjabarannya adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :

“Meningkatnya Usia Kawin Pertama”

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel. 6

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke -1

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi				Capaian
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Rata-Rata Usia Kawin Pertama	21				22,5	107,14
Persentase Capaian Rata-rata						107,14

Sumber:

Untuk menghitung Rata-Rata Usia Kawin Pertama **dengan rumus sebagai berikut:**

$$\text{Rata-Rata Usia Kawin Pertama (UKP)} = \frac{\sum(\text{Usia saat menikah pertama})}{\text{Jumlah wanita yang menikah}}$$

Keterangan :

Keterangan:

Pembilang = total usia (dalam tahun) wanita saat menikah pertama kali

Penyebut = jumlah wanita usia 10 tahun ke atas yang pernah menikah

Berdasarkan tabel kinerja, indikator **Rata-rata Usia Kawin Pertama** pada Tahun 2025 ditetapkan dengan **target sebesar 21 tahun**. Realisasi yang dicapai adalah **22,5 tahun**, sehingga menghasilkan **capaian kinerja sebesar 107,14 persen** berdasarkan hasil *Pendataan Keluarga 2023 (PK 2023)*.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa **kinerja melebihi target yang telah ditetapkan (over achievement)**. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya dan intervensi yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mendorong penundaan usia kawin pertama telah berjalan **efektif dan memberikan hasil yang positif**.

Peningkatan Rata-rata Usia Kawin Pertama ini mencerminkan adanya **perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat**, khususnya remaja dan keluarga, terhadap pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari **penguatan sosialisasi PUP**, optimalisasi peran **PIK Remaja dan Bina Keluarga Remaja**, serta **dukungan lintas sektor dan tokoh masyarakat** dalam pencegahan perkawinan usia dini.

Dengan **persentase capaian rata-rata sebesar 107,14 persen**, indikator ini dapat dikategorikan **sangat berhasil** dan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap

peningkatan kualitas keluarga serta pencapaian sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di daerah.

Indikator Rata-rata Usia Kawin Pertama menggambarkan tingkat kematangan usia perkawinan, yang berpengaruh langsung terhadap:

- Keberhasilan program Keluarga Berencana (KB),
- Kesehatan reproduksi ibu dan anak, serta
- Kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan.
- Semakin tinggi nilai rata-rata usia kawin pertama, maka semakin baik kualitas pembangunan keluarga di wilayah tersebut.
- Usia kawin pertama yang rendah menunjukkan masih kuatnya perkawinan usia muda, yang biasanya berhubungan dengan:
 - Putus sekolah atau rendahnya pendidikan perempuan,
 - Kurangnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi,

❖ Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Usia Kawin Pertama yaitu :

- Program Pengendalian Penduduk
 1. Kegiatan Pemasukan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Kota
- Program Pembinaan Keluarga Berencana
 1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
 2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB PKBPLKB
 3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB
- Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
 1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 2. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

2. Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya

Tabel. 10
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran I :				Meningkatnya Usia kawin Pertama			
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024			Tahun 2025			Target Tahun 2026
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	Rata-Rata Usia kawin Pertama)						
	21	22,5	107,14 %	21	22,5	107,14	

berdasarkan tabel indikator kinerja sasaran *Rata-Rata Usia Kawin Pertama*, dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Tahun 2024

Target Rata-Rata Usia Kawin Pertama ditetapkan sebesar **21 tahun**. Realisasi yang dicapai adalah **22,5 tahun**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **107,14%**. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah **melampaui target yang ditetapkan**, mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian penduduk, khususnya dalam upaya pendewasaan usia perkawinan.

2. Tahun 2025

Target indikator tetap ditetapkan sebesar **21 tahun**. Realisasi kembali mencapai **22,5 tahun** dengan tingkat capaian **107,14%**. Konsistensi capaian yang melebihi target ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilaksanakan bersifat **berkelanjutan dan efektif**, serta adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menunda usia perkawinan pertama.

3. Tren Kinerja

Secara tren, capaian indikator Rata-Rata Usia Kawin Pertama pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan **kinerja yang stabil dan sangat baik**, dengan nilai realisasi yang sama dan secara konsisten berada di atas target. Hal ini mengindikasikan bahwa

sasaran *Meningkatnya Usia Kawin Pertama* telah tercapai bahkan melampaui ekspektasi perencanaan.

4. Implikasi terhadap Target Tahun 2026

Dengan mempertimbangkan capaian dua tahun berturut-turut yang melampaui target, maka penetapan **Target Tahun 2026** perlu dilakukan secara **lebih progresif dan realistis**, misalnya dengan meningkatkan target Rata-Rata Usia Kawin Pertama atau mempertahankan target dengan fokus pada pemerataan capaian antarwilayah dan kelompok sasaran, khususnya wilayah dengan prevalensi perkawinan usia anak yang masih tinggi.

❖ Program Keluarga Berencana

Target program tahun 2025, dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu dan Tahun Terakhir

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / subkegiatan (Output)	Targ et	Reali sasi	Target	Realisasi			
			2024		2025	2025			
						TW I	TW II	TW III	TW IV
I	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (persen)	25,60	35,41	25,60	0			
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (persen)	40,81	38,81	40,81	38,95	38.5		
		Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) (persen)	12,01	8,14	12,01	6,35	5.09		

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
			2024		2025	2025			
						TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE) (persen)	100	100	100	25	25		
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai yang mendapat dukungan Operasional Pembiayaan (Balai Penyuluhan)	12	100	12	3	3		
	Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balain Penyuluhan Bangsa Kencana 9Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan Keluarga Berencana0	1	100	1	1			
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1	100	1	1			
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Sarana KIE yang disediakan (jenis)	8	100	8	2			
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),	1	100	1	1			

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
			2024		2025	2025			
						TW I	TW II	TW III	TW IV
	Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (minilok)	Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)							
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana 9Pembangunan Keluarga,Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui Media Massa Cetak dan Eletronik serta Media Luar Ruang	1	100	1	1			
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi 9KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	3	100	3	1			
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	40	100	40	10			
2	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (persen)	12	100	12	3			

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
			2024		2025	2025			
						TW I	TW II	TW III	TW IV
	Daerah Kabupaten/Kota								
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	11.500	100	11.500	13.688	13.456		
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Mendapatkan Distribusi Alokasi (Fasilitas Kesehatan)	21	100	21	5			
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	100	1	1			
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana yang tersedia (Unit)	76	100	76	19			
	Pembinaan Pelayanan keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan	1	100	1	1			

LAPORAN EVALUASI TRIWULAN IV 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / subkegiatan (Output)	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
			2024		2025	2025			
						TW I	TW II	TW III	TW IV
	berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya							

Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun lalu dan sampai dengan TW IV tahun 2025 ada beberapa yang mengalami penurunan dimana jika capaian dari tahun ke tahun mengalami penurunan maka dikatakan berhasil dapat dilihat pada tabel diatas seperti capaian realisasi **Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (persen), Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) (persen)**, Namun ada juga indikator ini sifatnya dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan capaian dari tahun sebelumnya yaitu **Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%),Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) (persen)**

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi tahun 2025 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, sangat memungkinkan dapat dicapai..

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra DPPKB Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut Ini :

Tabel. 11
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah
(2025 – 2029)

Sasaran I :	Meningkatnya Usia Kawin Pertama			Target Akhir Renstra 2029	% Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				
	Tahun 2024	Tahun 2025	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2025		
Rata-rata Usia Kawin Pertama	22,5	22,5	2,79	2,4 %	2,4%

4. Perbandingan Capaian Kinerja DPPKB Kab.Luwu Timur Tahun 2025 dengan capaian BKKBN Provinsi dan capaian BKKBN Nasional menurut PK 2024

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja DPPKB Kab. Luwu Timur Tahun 2024 dengan target BKKBN Provinsi dan target BKKBN Nasional Menurut PK 2024.

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Kinerja DPPKB kab.Luwu Timur Tahun 2025		Capaian Kinerja Renstra BKKBN Provinsi SulSel 2025-2029	Capaian Kinerja Renstra BKKBN Nasional 2025-2029
			Target	Realisasi	2025	2025
1.	Rata-Rata Usia Kawin Pertama	Usia	21	22,5	22,3	22.3

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, indikator **Rata-Rata Usia Kawin Pertama** menunjukkan kinerja yang **sangat baik dan melampaui target**. DPPKB Kabupaten Luwu Timur menetapkan target sebesar **21 tahun**, dan berhasil merealisasikan capaian sebesar **22,5 tahun**, atau lebih tinggi **1,5 tahun** dari target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan keberhasilan intervensi program pengendalian penduduk dan pembinaan ketahanan keluarga, khususnya dalam upaya pendewasaan usia perkawinan.

Apabila dibandingkan dengan **Renstra BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029** yang menetapkan capaian sebesar **22,3 tahun**, kinerja DPPKB Kabupaten Luwu Timur berada **di atas capaian provinsi**, sehingga menunjukkan kontribusi positif daerah dalam mendukung sasaran pembangunan kependudukan di tingkat provinsi.

Selanjutnya, dibandingkan dengan **Renstra BKKBN Nasional Tahun 2025–2029** yang juga menargetkan **22,3 tahun**, capaian Kabupaten Luwu Timur **lebih tinggi**, yang mencerminkan bahwa kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program Bangga Kencana di daerah telah berjalan **selaras dan bahkan melampaui arah kebijakan nasional**.

Dengan demikian, capaian indikator ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan pencapaian target daerah, tetapi juga menunjukkan **sinkronisasi dan dukungan nyata DPPKB Kabupaten Luwu Timur terhadap pencapaian target pembangunan kependudukan di tingkat provinsi dan nasional**, serta menjadi landasan yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatam/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Rata-rata Usia kawin Pertama, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

1. Masih kuatnya norma sosial dan budaya
2. Rendahnya tingkat pendidikan dan literasi remaja
3. Keterbatasan akses dan kualitas layanan KIE kesehatan reproduksi remaja
4. Faktor ekonomi keluarga
5. Kurangnya peran serta orang tua dan tokoh masyarakat
6. Pengaruh lingkungan dan pergaulan remaja
7. Belum optimalnya sinergi lintas sektor
8. Keterbatasan data terpilah dan pemutakhiran data

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu:

1. Penguatan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
2. Optimalisasi peran PIK Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR)

3. Peningkatan koordinasi dan sinergi lintas sektor
4. Pelibatan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat
5. Peningkatan akses pendidikan dan pemberdayaan remaja
6. Penguatan edukasi kesehatan reproduksi remaja
7. Pemanfaatan media informasi dan teknologi digital
8. Penguatan data dan pemantauan berbasis wilayah.

Upaya -upaya penting yang dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain:

- a. Pelaksanaan sosialisasi dan KIE Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) secara berkelanjutan
- b. Penguatan dan pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)
- c. Optimalisasi peran Bina Keluarga Remaja (BKR).
- d. Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas program
- e. Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi remaja
- f. Pelibatan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat
- g. Pemanfaatan media komunikasi dan teknologi informasi
- h. Pemutakhiran dan pemanfaatan data usia kawin pertama

Faktor Pendukung lainnya :

- Petugas lapangan (PLKB) di Luwu Timur jumlahnya di atas ratio PLKB nasional yakni 92 PLKB sementara jumlah desa yang ada hanya 128 desa.
- Adanya dukungan dari mitra (puskesmas dan RS sebagai penyedia tenaga medis dalam kegiatan pelayanan keluarga berencana)
- Dukungan anggaran yang tidak hanya bersumber dari APBD tetapi juga dari pusat melalui anggaran DAK

6. Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD sebagai pendukung pencapaian sasaran Strategis I yang terdiri dari 3 Program Ini dengan pagu anggaran sebesar **Rp 6.620.620.758,-** dengan realisasi sampai dengan TW IV anggaran sebesar **Rp**

6.193.218.689,- sehingga capaian anggaran yang diperoleh sebesar **93,54%**.
Sedangkan realisasi kinerja yang diperoleh adalah sebesar **107,14%**.

❖ **Analisis Efisiensi Sumber Daya**

Tabel. 8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Usia kawin Pertama	Rata-Rata Usia kawin Pertama	21	22,5	107,14	6.620.620.758	6.193.218.689	93.54%
Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (Angka)	2,23	2,24	99,5	420.389.550	374.871.524	89.17%
Program Pembinaan Keluarga berencana	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Angka)	23	23,1	99.56			
	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR) (Persen)	72,04	70,12	97,33	4.204.211.500	3.956.866.683	94,12
	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	8.12	8,12	100			
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Presentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (persen)	60%	73,40	122.33	1.996.019.708	1.861.480.482	93.26%

Tabel. 9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya Usia Kawin Pertama	Rata-Rata Usia kawin Pertama	107,14%	93,54%	18%

Efisiensi anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kinerja perangkat daerah. Pada Sasaran Strategis **Meningkatnya Usia Kawin Pertama**, efisiensi anggaran dapat dilihat dari perbandingan antara capaian indikator kinerja, tingkat penyerapan anggaran, dan efisiensi biaya yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, indikator **Rata-Rata Usia Kawin Pertama** menunjukkan capaian sebesar **107,14%**, yang berarti realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian kinerja yang sangat baik ini didukung oleh penyerapan anggaran sebesar **93,54%**, sehingga masih terdapat sisa anggaran yang tidak terserap namun tidak mengurangi kualitas maupun hasil kinerja yang dicapai.

Selisih antara capaian kinerja yang melebihi target dengan tingkat penyerapan anggaran tersebut menghasilkan **tingkat efisiensi biaya sebesar 18%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa sasaran strategis dapat dicapai secara **efektif dengan penggunaan anggaran yang lebih optimal**, mencerminkan penerapan prinsip *value for money* dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Efisiensi anggaran ini dicapai melalui optimalisasi perencanaan kegiatan, pemanfaatan sumber daya secara tepat sasaran, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemilihan strategi intervensi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesadaran masyarakat

dalam pendewasaan usia perkawinan. Dengan demikian, alokasi anggaran yang tersedia mampu menghasilkan output dan outcome yang maksimal.

Secara keseluruhan, kinerja anggaran pada Sasaran Strategis **Meningkatnya Usia Kawin Pertama** menunjukkan hubungan yang selaras antara **tingginya capaian kinerja, penyerapan anggaran yang terkendali, dan efisiensi biaya yang positif**. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran telah mendukung pencapaian sasaran strategis secara berkelanjutan dan akuntabel.

7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Program Pengendalian Penduduk

Indikator Kinerja Program Pengendalian Penduduk yaitu Rata rata jumlah anak per keluarga (anak) yang diukur dengan Formula :

$$\text{Rata-Rata Jumlah anak per keluarga} = \frac{\text{Jumlah Anak}}{\text{Jumlah KK}} \times 100\%$$

Program ini terdiri dari 2 Kegiatan dan 6 sub kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk. Adapun Sub Kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut :
 - ✓ Sub kegiatan Implementasi pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan Nonformal
 - ✓ Sub. Kegiatan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
 - ✓ Sub kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
- b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Kota
 - ✓ Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 - ✓ Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan Pelayanan KB

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Indikator Kinerja Program Pembinaan Keluarga Berencana yaitu:

- Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) ditargetkan 60.50% dan terealisasi sampai dengan TW II yaitu 71.95%

atau dengan capaian 0% sehingga realisasi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Peserta Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$$

Jumlah PUS

- Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19), target capaiannya : 43,20 tidak mengguna formulasi tetapi bersumber dari data SUSENAS 2021
- Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) ditargetkan 12,40% dan terealisasi 8,11% atau dengan capaian 91,69%. sehingga realisasi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah PUS yang tidak ber KB}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$$

- Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) ditargetkan 40,81 % dan terealisasi sampai dengan Triwulan II 39,91% atau dengan capaian 86,44% sehingga realisasi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$= \frac{\text{jumlah penggunaan KB jangka panjang}}{\text{jumlah KB aktif}} \times 100$$

Sasaran 2 :

NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2025

Tabel. 20
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran III :	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Notifikasi
	Tahun 2025			
	Target	Realisasi	Capaian	
Indikator Kinerja Sasaran				
NILAI SAKIP	72	0	0	<div></div>

LAPORAN EVALUASI TRIWULAN IV 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Keterangan : ● Mencapai/Melampui Target ; ● Belum Mencapai Target

Formulasi Indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah

“NILAI SAKIP Hasil LHE Inspektorat”.

Target Indikator sasaran Tahun 2024 adalah Nilai SAKIP 80 (A), namun realisasinya belum dapat dirilis didalam tabel karena masih dalam proses evaluasi oleh Tim Evaluator Inspektorat, sehingga hanya dapat dibandingkan dengan realisasi Triwulan I Tahun sebelumnya. Nilai SAKIP berdasarkan LHE Inspektorat Triwulan IV tahun 2024 yaitu 78,55 (BB), realisasi tersebut belum mencapai target Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2024 yaitu 72,25 dan Triwulan III yaitu 72,75. Hal ini dapat tercapai karena telah dilakukan beberapa perbaikan dokumen pendukung SAKIP sesuai dengan hasil coaching clinic Penguatan SAKIP oleh Kementerian PAN-RB, disamping itu beberapa rekomendasi LHE Inspektorat tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti begitu juga dengan rekomendasi LHE Kementerian PAN-RB. Diantaranya yaitu dengan melakukan reviu atau perbaikan dokumen perencanaan

2. Perbandingan antara target dan realisasi Triwulan IV Tahun 2025 dengantahun sebelumnya

Tabel. 21

Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran III : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah										Target Tahun 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 20221			Tahun 2023			Triwulan IV Tahun 2025			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Targ et	Realisasi	Capaian	
NILAI SAKIP	70	79,25	113,21	75	78,55	104.73	72	0	0	80

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa Nilai SAKIP tahun 2024 belum dapat dirilis karena masih menunggu hasil LHE

LAPORAN EVALUASI TRIWULAN IV 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Inspektorat. Untuk Triwulan IV Tahun 2024 hanya dapat dibandingkan dengan Nilai SAKIP Triwulan IV Tahun 2024. Namun telah dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, Dimana target setiap tahunnya dapat tercapai dengan nilai yang meningkat dan melebihi dari target yang direncanakan. Dalam pencapaian target ataupun untuk mempertahankan Nilai SAKIP yang diperoleh, beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Melakukan Reviu kembali Dokumen Perencanaan (Renstra)
- b. Penetapan target kinerja mengacu kepada capaian dan realisasi tahunsebelumnya
- c. Melengkapi IKU dengan defenisi operasional
- d. Meningkatkan kualitas LKJ dengan memperdalam analisis capaian dan disertaidata dan bukti dukung yang relevan
- e. Melakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana AksiKinerja dan Perjanjian Kinerja
- f. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang
- g. Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja
- h. Melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja besertahambatannya
- i. Melakukan evaluasi program dan kegiatan
- j. Mempublikasikan dokumen Renstra, PK, IKU dan LAKIP pada website InstansiPemerintah
- k. Menindaklanjuti rekomendasi LHE Kementerian PAN-RB dan LHE Inspektorat.

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini

dengan TargetJangka Menengah

Tabel. 22

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah(2025 - 2029)

Sasaran II :		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2023 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi		Triwulan IV Tahun 2025		
	realisasi sampai dengan tahun Tahun 2025				

LAPORAN EVALUASI TRIWULAN IV 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Nilai SAKIP	0	0	80	105,5%
-------------	---	---	----	--------

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa perbandingan capaian kinerja sampai sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 yaitu 75,16 (BB) telah melebihi dari target jangka menengah. Hal tersebut dapat dicapai karena adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Coaching Clinic untuk penguatan SAKIP OPD dan Pemda. Dampaknya yaitu adanya perbaikan dokumen pendukung SAKIP dan beberapa Rekomendasi hasil LHE Kementerian PAN-RB dan LHE Inspektorat telah ditindaklanjuti oleh OPD. Diantaranya yaitu Reviu Dokumen Renstra, Perbaikan Perjanjian Kinerja dengan melengkapi dengan definisi operasional, perbaikan dokumen LKJ sesuai sistematika Permenpan 53 Tahun 2014, perbaikan Dokumen IKU dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi dsb.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunankinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran yaitu :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan secara periodik
- Pelaksanaan tindak lanjut atas setiap rekomendasi LHE Inspektorat dan LHE Kementerian PAN-RB
- Mereviu Kembali dokumen perencanaan PD
- Penetapan target kinerja yang tepat

Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Data pendukung dari bidang teknis belum maksimal
- Belum adanya regulasi dalam penetapan punishment and reward sehingga hasil pengukuran kinerja tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengurangan/penambahan penghasilan

- Belum adanya aplikasi yang digunakan dalam pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja

Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- Memaksimalkan pengolahan data dan informasi dari bidang terkait
- Untuk dibahas lebih lanjut dilevel pimpinan terkait regulasi penetapan punishment dan reward untuk dijadikan sebagai payung hukum

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran pendukung DPPKB, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- a. Efisiensi anggaran pada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan perbaikan sehingga layak untuk digunakan Kembali.
- b. Terdapat harga satuan untuk belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang bisa digunakan untuk membiayai lebih dari 1 unit peralatan kantor.

Efisiensi Sumber Daya

- a. Keterbatasan jumlah ASN pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dimaksimalkan dengan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan tenaga upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
- b. Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 23

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran III :	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Kinerja		Alokasi Anggaran Triwulan IV TA 2025	Anggaran	
			Realisasi Triwulan III Tahun 2025	Capaian (%)		Realisasi Triwulan III TA. 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP	80			3.846.469.726	3.617.897.516	94.04

Catatan : Realisasi Triwulan IV TA. 2025 ()

Tabel. 24

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran III	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP	0	27.44	0

Pencapaian sasaran pendukung sebesar 0% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 27.44%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 22.25%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan **formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan**. Target 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%, dan menyerap anggaran sebesar 95.03%. Capaian kinerja program mencapai target karena terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang capaiannya kinerjanya <100%, sehingga berpengaruh terhadap kinerja program secara keseluruhan. Seperti pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (4 Keg) yang hanya mencapai 94,06% dari pagu sebesar Rp. 3,846,469,726,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.617.897.516,00

Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Tabel. 25

Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025	Target TW I II TA. 2025	Realisasi TW III TA. 2025	Capaian (%)
	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%) (persen)	100	75	73.87	98.50%
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100	25	25	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	3	1	1	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2	0	0	0%

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025	Target TW I II TA. 2025	Realisasi TW III TA. 2025	Capaian (%)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	1	1	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	4	4	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100	100	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	19	19	100%
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Meningkatnya kesejahteraan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	18	4	4	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Terwujudnya pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase Barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan	100%	25	25	100%
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Tersedianya dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4	1	1	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	25	25	100%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya laporan data administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	1	1	100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pegawai	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	4	0	0	50%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Umum perangkat daerah	100%	25	25	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2	2	2	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	2	2	100%

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025	Target TW I II TA. 2025	Realisasi TW III TA. 2025	Capaian (%)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	4	4	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	3	3	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60	15	15	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	1	1	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	3	3	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	40	50	125%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	1	1	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	12	12	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	1	1	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahandaerah yang siap pakai	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	50%	50%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Atau Kendaraan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	96	10	10	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16	4	3	75%

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025	Target TW I III TA. 2025	Realisasi TW III TA. 2025	Capaian (%)
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	1	1	100%
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertumbuhan Penduduk	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk) (Nilai)	2	1	1	50%
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersedianya kebijakan tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk) (Nilai)	2	1	1	50%
	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Sosialisasi tentang pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Organisasi yang mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	24	8	8	100%
	Implementasi pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan Nonformal	Terlaksananya Implementasi Pendidikan kependudukan jalur pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	2	1	1	100%
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBP	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program KKBP	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	2	1	1	100%
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data mikro Keluarga setiap desa	Cakupan Penyediaan data mikro keluarga di setiap desa (persen)	100	25	25	100%
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi keluarga yang tersedia	1	1	1	100%
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	1	1	100%
	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan data pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengelohan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1	1	1	100%

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025	Target TW III TA. 2025	Realisasi TW III TA. 2025	Capaian (%)
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Meningkatnya capaian Pelayanan KB	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	40.81	40.81	37.8	92.624%
			Angka Kelahiran Remaja Perempuan usia 1519 per 1.000 perempuan usia 1519 tahun ASFR 15 19	25.60	25.60	25.60	
			Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR	60.50	60.5	69.38	114.68%
			Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi Unmeetneed)	12.01	12.01	11.38	94.754%
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Budaya Lokal	Terlaksannya Kegiatan KIE di Masyarakat	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	100	15	15	100%
	Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1	1	1	100%
	Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai penyuluhan Bangsa Kencana	Terlaksananya Pengelolaa Operasional dan Sarana di Balai penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balain Penyuluhan Bangsa Kencana 9Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan Keluarga Berencana0	1	1	1	100%
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa	Terlaksananya Pelaksanaa Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rakorcam, Rakordes, Minilok	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	1	1	100%
	Lokakarya (minilok)		Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)				

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025	Target TW I II TA. 2025	Realisasi TW III TA. 2025	Capaian (%)
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana 9Pembangunan Keluarga,Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1	1	1	100%
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi 9KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	3	1	1	100%
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	40	10	10	100%
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tersedianya Tenaga Penyuluh Lapangan	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk (persen)	100%	112	112	100%
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	TerlaksananyaPenggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi masyarakat Pedesaan (IMP)	581	581	581	100%
	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	20	35	35	100%

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025	Target TW I II TA. 2025	Realisasi TW III TA. 2025	Capaian (%)
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1	1	1	100%
	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (persen)	100	100	100	100%
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya	Terlaksananya Pendistribusian Alokasi	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	1	1	100%
	Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terlaksananya Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	11,500			#DIV/0!
	Pembinaan Pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	1	1	100%
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Tersedianya Stakholder dalam mendukung kegiatan KB	Jumlah Stakholder/ Pemangku kepentingan dan mitra kerja (Termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK (Nilai)	100%	100%	100%	100%
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terlaksananya Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1	1	1	100%

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025	Target TW I II TA. 2025	Realisasi TW III TA. 2025	Capaian (%)
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	61			#DIV/0!
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Rata-rata usia Kawin Pertama	20.00			#DIV/0!
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	71.18			#DIV/0!
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terbentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelollan Keuangan keluarga)	1	1	1	100%
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, IK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	1	1	100%
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia.	20			#DIV/0!
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	4	4	4	100%

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025	Target TW I II TA. 2025	Realisasi TW III TA. 2025	Capaian (%)
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Terbentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	7	7	7	100%
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya peningkatan Mitra serta organisasi kemasyarakatan	Persentase Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Persen)	75.01		-	#DIV/0!
	Promosi dan Sosialisasi program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga bagi mitra Kerja	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga bagi mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1	1	1	100%
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,Baduta/Balita)	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,Baduta/Balita a)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran,Baduta/Balita a)	3	1	1	100%
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran,Baduta/Balita a)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran,Baduta/Balita a)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran,Baduta/Balita a) yang mendapat Pendampingan	3	1	1	100%

7. KESIMPULAN

Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yaitu % diperoleh dari rumus perhitungan :

$$= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100$$

$$= \frac{100}{45.87} \times 100$$

$$= 95.44\%$$

Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPA-SKPD DPPKB Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : **Rp. 3,846.469.726,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 3.617.897.516,-** atau **94.05%**.

3.3 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

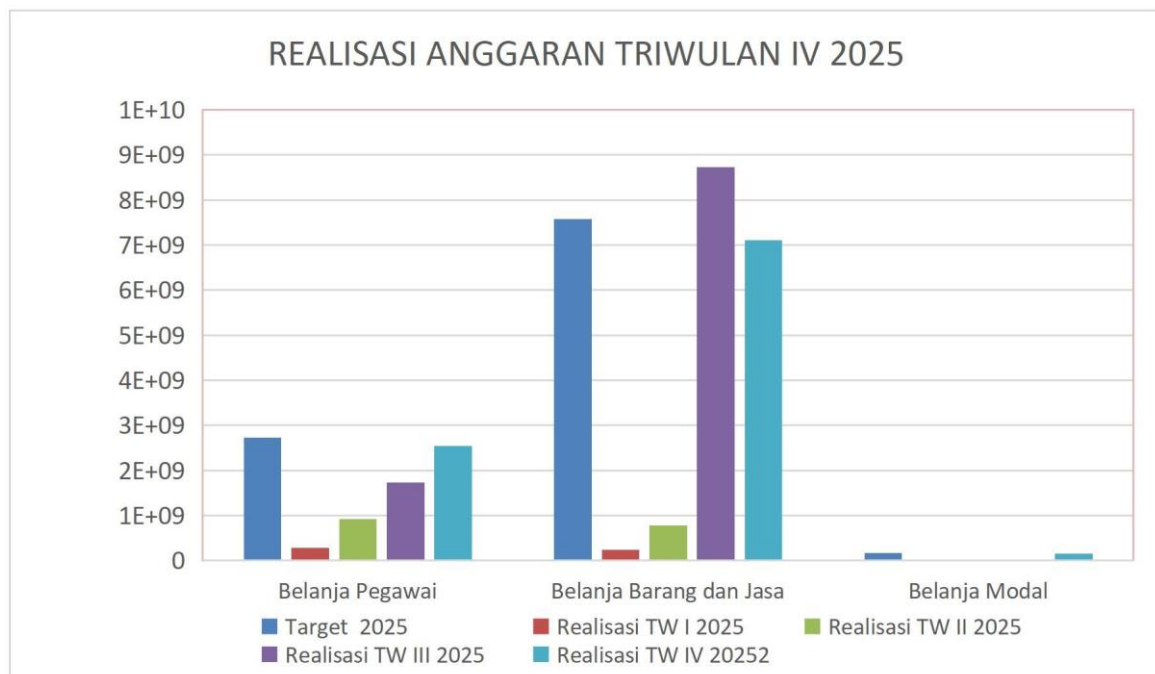
Anggaran APBD untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 10.467.090.484,00,-** (*Sepuluh Milyar Enam Ratus enam Puluh enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), terdiri dari :

1. Belanja Pegawai **Rp. 2.723.382.076,-**
2. Belanja Barang dan jasa **Rp. 7.580.582.408,-**
3. Belanja Modal **Rp. 163.126.000,-**

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 4 program, 16 kegiatan serta 53 sub kegiatan. Sedangkan target dan realisasi anggaran pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 9.810.816.205,- atau 93.73%** yang terdiri

1. Belanja Pegawai Rp. 2.549.469.368,-
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.103.023.338,-
3. Belanja Modal Rp. 158.323.499,-

dapat di lihat pada grafik berikut ini :



Tabel. 26

Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA (24 Keg)	3.846.469.726,00	3.846.469.726,00	3,617,897,516.00	94.06	984.201.207,84	30,39	1.592.187.927,00	41,39
I.I	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (4 Keg)</i>	<i>72.194.200,00</i>	<i>72.194.200,00</i>	<i>33.238.801,00</i>	<i>50,22</i>	<i>32.952.210,00</i>	<i>49,78</i>	<i>38.955.399,00</i>	<i>53,96</i>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.599.300,00	45.599.300,00	44,712,866.00	98.06	18.249.999,00	43,77	22.149.999,00	48,58
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2.512.350,00	2.512.350,00	2,355,675.00	93.76	2.512.350,00	100,00	2.512.350,00	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	3.012.800,00	3.012.800,00	2,733,184.00	90.72	1.561.100,00	51,82	1.561.100,00	51,82
4	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>21.069.750,00</i>	<i>21.069.750,00</i>	<i>19,785,583.00</i>	<i>93.91</i>	<i>10.628.761,00</i>	<i>56,04</i>	<i>12.731.950,00</i>	<i>60,43</i>
I.II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (2 Keg)	2.778.310.176,00	2.778.310.176,00	2,603,639,718.00	93.71	800.420.492,84	31,17	1.010.645.623,00	36,38
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.723.382.076,00	2.723.382.076,00	2,549,469,368.00	93.61	785.567.716,84	31,17	988.772.847,00	36,31
2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	54.928.100,00	54.928.100,00	54,170,350.00	98.62	14.852.776,00	31,00	21.872.776,00	39,82
I.III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1 Keg)	38.702.750,00	38.702.750,00	30,845,945.00	79.70	17.870.110,00	58,59	26.070.110,00	67,36
1	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	38.702.750,00	38.702.750,00	30,845,945.00	79.70	17.870.110,00	58,59	26.070.110,00	67,36
I.IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2 Keg)	84.517.000,00	84.517.000,00	67,941,870.00	80.39	26.047.066,00	35,89	37.995.066,00	44,96
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	41.224.000,00	41.224.000,00	38,718,708.00	93.92	8.515.228,00	20,66	8.515.228,00	20,66

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	43.293.000,00	43.293.000,00	29,223,162.00	67.50	17.531.838,00	55,93	29.479.838,00	68,09
I.V	Administrasi Umum Perangkat Daerah (7 Keg)	487.002.800,00	487.002.800,00	469,711,276.00	96.45	31.781.793,00	15,66	315.882.193,00	64,86
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.675.000,00	5.675.000,00	5,675,000.00	100.00	81.000,00	1,90	1.502.000,00	26,47
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.126.000,00	163.126.000,00	158,323,499.00	97.06	12.000.000,00	100,00	163.126.000,00	100,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.528.650,00	15.528.650,00	15,223,800.00	98.04	861.200,00	6,91	3.919.850,00	25,24
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.658.750,00	7.658.750,00	7,543,750.00	98.50	2.910.000,00	43,34	3.853.750,00	50,32
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.120.000,00	6.120.000,00	5,640,000.00	92.16	930.000,00	20,26	2.460.000,00	40,20
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.250.000,00	19.250.000,00	19,233,900.00	99.92	4.455.000,00	41,42	12.950.000,00	67,27
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah	269.644.400,00	269.644.400,00	258,071,327.00	95.71	10.544.593,00	6,93	128.070.593,00	47,50
I.VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3 Keg)	103.412.800,00	103.412.800,00	100,700,411.00	97.38	6.217.163,00	8,05	32.437.163,00	31,37
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.812.800,00	3.812.800,00	3,360,740.00	88.14	1.783.335,00	46,77	1.783.335,00	46,77
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.440.000,00	55.440.000,00	54,929,671.00	99.08	2.393.828,00	5,45	13.893.828,00	25,06
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.160.000,00	44.160.000,00	42,410,000.00	96.04	2.040.000,00	6,93	16.760.000,00	37,95
I.VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.330.000,00	282.330.000,00	275,470,988.00	97.57	68.912.373,00	31,18	130.202.373,00	46,12
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.240.000,00	147.240.000,00	147,009,488.00	99.84	7.854.873,00	8,64	64.144.873,00	43,56
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.090.000,00	20.090.000,00	16,100,000.00	80.14	9.020.000,00	44,90	9.020.000,00	44,90

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115.000.000,00	115.000.000,00	112,361,500.00	97,71	52.037.500,00	47,31	57.037.500,00	49,60
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK (6 Keg)	420.389.550,00	319.325.625,00	420,389,550.00	374,871,524.00	146.852.833,00	45,99	247.916.758,00	58,97
II.I	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk (3 Keg)	64.184.900,00	59.480.975,00	64,184,900.00	60,917,018.00	44.468.435,00	74,76	49.172.360,00	76,61
1	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	20.436.300,00	16.503.375,00	20,436,300.00	19,878,741.00	16.503.375,00	100,00	20.436.300,00	100,00
2	Implementasi pendidikan Kependudukan jalur pendidi-kan formal dan Nonformal	18.915.400,00	18.144.400,00	18,915,400.00	17,712,040.00	5.656.860,00	31,18	6.427.860,00	33,98
3	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	24.833.200,00	24.833.200,00	24,833,200.00	23,326,237.00	22.308.200,00	89,83	22.308.200,00	89,83
II.II	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Kota	356.204.650,00	259.844.650,00	356,204,650.00	313,954,506.00	102.384.398,00	39,40	198.744.398,00	55,80
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000,00	47.500.000,00	60,000,000.00	50,944,925.00	21.377.075,00	45,00	33.877.075,00	56,46
2	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	35.204.650,00	32.344.650,00	35,204,650.00	33,870,573.00	11.624.150,00	35,94	14.484.150,00	41,14
3	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	117.000.000,00	68.400.000,00	117,000,000.00	112,800,000.00	18.700.000,00	27,34	67.300.000,00	57,52
4	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan Pelayanan KB	144.000.000,00	111.600.000,00	144,000,000.00	116,339,008.00	50.683.173,00	45,42	83.083.173,00	57,70
III	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA KB	4.204.211.500,00	2.669.271.500,00	1.903.486.346,00	45,28	765.785.154,00	28,69	2.300.725.154,00	54,72
III.I	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal (6 Keg)	900.810.200,00	701.800.200,00	562.384.838,00	80,13	139.415.362,00	19,87	338.425.362,00	37,57

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai penyuluhan Bangsa Kencana	335.820.000,00	263.320.000,00	256.857.100,00	97,55	6.462.900,00	2,45	78.962.900,00	23,51
2	Pelaksanaan Mekanisme Operasional program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (minilok)	249.893.300,00	194.913.300,00	169.395.805,00	86,91	25.517.495,00	13,09	80.497.495,00	32,21
3	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa dan Elektronik serta Media Luar Ruang	99.750.000,00	99.750.000,00	53.541.960,00	53,68	46.208.040,00	46,32	46.208.040,00	46,32
4	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	112.474.900,00	57.344.900,00	26.787.223,00	46,71	30.557.677,00	53,29	85.687.677,00	76,18
5	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	102.872.000,00	86.472.000,00	55.802.750,00	64,53	30.669.250,00	35,47	47.069.250,00	45,76
III.II	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) (2 Keg)	2.281.555.000,00	1.153.905.000,00	906.788.150,00	78,58	247.116.850,00	21,42	1.374.766.850,00	60,26
1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.235.065.000,00	1.121.415.000,00	875.099.050,00	78,04	246.315.950,00	21,96	1.359.965.950,00	60,85
2	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	20.190.000,00	20.190.000,00	19.389.100,00	96,03	800.900,00	3,97	800.900,00	3,97
3	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	26.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000	100,00	-	0,00	14.000.000,00	53,23
III.III	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota (3 Keg)	852.699.300,00	684.229.300,00	391.819.358,00	57,26	292.409.942,00	42,74	460.879.942,00	54,05
1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk	77.388.000,00	63.963.000,00	44.156.300,00	69,03	19.806.700,00	30,97	33.231.700,00	42,94

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jaringan & Jejaringnya								
2	Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	746.961.300,00	601.356.300,00	332.344.058	55,27	269.012.242,00	44,73	414.617.242,00	55,51
3	Pembinaan Pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	28.350.000,00	18.910.000,00	15.319.000,00	81,01	3.591.000,00	18,99	13.031.000,00	45,96
III.IV	Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	169.147.000,00	129.337.000,00	42.494.000,00	32,86	86.843.000,00	67,14	126.653.000,00	74,88
1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	169.147.000,00	129.337.000,00	42.494.000	32,86	86.843.000,00	67,14	126.653.000,00	74,88
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA KS (7 Keg)	1.996.019.708,00	1.274.319.029,00	859.822.387,00	67,47	414.496.642,00	32,53	1.136.197.321,00	56,92
IV.I	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (6 Keg)	477.241.808,00	357.935.965,00	121.639.323,00	33,98	236.296.642,00	66,02	355.602.485,00	74,51
1	Promosi dan Sosialisai Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjut-usiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	26.145.000,00	26.145.000,00	25.944.708,00	99,23	200.292,00	0,77	200.292,00	0,77
2	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	235.642.480,00	131.703.164,00	33.903.164,00	25,74	97.800.000,00	74,26	201.739.316,00	85,61
3	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Usaha Peningkatan	130.000.000,00	130.000.000,00	-	0,00	130.000.000,00	100,00	130.000.000,00	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))								
4	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	72.990.028,00	57.623.501,00	49.339.501,00	85,62	8.284.000,00	14,38	23.650.527,00	32,40
5	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	12.464.300,00	12.464.300,00	12.451.950,00	99,90	12.350,00	0,10	12.350,00	0,10
IV.II	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (1 Keg)	1.518.777.900,00	1.518.777.900,00	1,518,508,414.00	99.98	178.200.000,00	19,45	780.594.836,00	51,40
1	Promosi dan Sosialisasi program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga bagi mitra Kerja	7.377.900,00	7.377.900,00	7,108,414.00	100,00	-	0,00	474.836,00	6,44
2	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran,Baduta/Balita)	687.000.000,00	687.000.000,00	687,000,000.00	100,00	-	0,00	354.600.000,00	51,62
3	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	824.400.000,00	824.400.000,00	824,400,000.00	100	178.200.000,00	30,88	425.520.000,00	51,62
TOTAL BELANJA		10.467.090.484,00	7.501.399.160,84	9,811,116,205.00	93.73	2.311.335.836,84	30,81	5.277.027.160,00	50,42

3.4 Tindak Lanjut hasil Evaluasi

Berdasarkan Laporan Hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada LHE AKIP Nomor 700.1.2.1/351/XI/ITKAB Tanggal 18 November 2024 terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti dan Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur telah melakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, diantaranya :

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP tahun 2024

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tidak Lanjut	Status/progres penyelesaian
1.	Agar melakukan koordinasi dengan OPD yang menangani Perencanaan dan mengkoordinir penyusunan Pedoman Tehnis Perencanaan Kinerja, pedoman Tehnis Pengukuran Kinerja, SOP Pengumpulan Data Kinerja agar seragam di setiap OPD		Selesai
2.	Lakukan perbaikan dalam dokumen perencanaan, gambarkan keterkaitan antar indicator sasaran, formalkan kemudian publikasikan;		
3.	Lakukan perbaikan pada dokumen perjanjian kinerja, lengkapi dengan formulasi perhitungan sehingga pengukuran kinerja dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tetapkan target trieulan berdasarkan target kinerja yang ditetapkan pada perjanjian kinerja. Dasari hasil pengukuran kinerja untuk pemberian pemberian reward dan punishment. Pedomani hasil pengukuran kinerjasebagai dasar penyesuaian strategi, aktivitas dan penggunaan anggaran;	Perjanjian Kinerja telah diperbaiki	Selesai
4.	Lengkapi setiap perbandingan realisasi kinerja dengan analisis yang memadai dan mendalam. Libatkan setiap pegawai dalam pelaporan kinerja sehingga setiap pegawai peduli pada hasil laporan kinerja dan pada akhirnya hasil pelaporan kinerja dapat menjadi dasar perbaikan kinerja OPD selanjutnya		
5.	Tingkatkan SDM yang melakukan evaluasi internal sehingga evaluasi dapat berjalan secara maksimal dan mendalam dan pada akhirnya dapat meningkatkan		

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tidak Lanjut	Status/progres penyelesaian
	implementasi SAKIP di OPD		

BAB 4

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 1 sasaran pendukung yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, serta Rencana Strategis (Renstra) DPPKB Tahun 2025-2029.

Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran pada Triwulan IV Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran belanja APBD Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. **9.810.816.205,- (93,73%)** yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 2.549.469.368,- (93.61%) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 7.103.023.338,- (93.70%) dan Belanja Modal Rp 158.323.499,- (97.06%).
- b. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis I dengan indikator Rata-Rata Usia kawin Pertama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Pneduduk dan Keluarga Berencana Triwulan IV Tahun 2025 sebesar **107,14%** dengan ***predikat BAIK***.
- c. Persentase Capaian Kinerja sasaran IV (sasaran pendukung) yaitu Nilai SAKIP yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Triwulan IV Tahun 2025 sebesar **0**, dengan belum bisa menentukan ***predikat*** .karena belum ada hasil evaluasi dari Inspektorat

-
- d. Faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 terhadap beberapa target sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Timur yaitu :
- Pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai rencana aksi
 - Keterlambatan proses E-Catalog
 - Pengolahan data dan informasi pada lingkup bidang yang belum maksimal
 - Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi
 - Karena adanya inpres efisiensi anggaran sehingga Belanja perjalanan dinas, Belanja Alat Tulis kantor, Belanja Cetak, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Kertas dan Cover ditunda
 - Menunggu Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan dari Pimpinan
- e. Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kab. Luwu Timur adalah sebagai berikut :
- Pelaksanaan program/kegiatan sesuai rencana aksi
 - Percepatan proses pengadaan melalui E-Catalog
 - Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang di tingkat SKPD
 - Memaksimalkan penyebaran informasi kebencanaan melalui media sosial
 - Memaksimalkan pengolahan data dan informasi lingkup OPD
 - Mencermati /kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengantisipasi SILPA program diakhir tahun
 - Meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait Program Bangga Kencana.
-

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan tugas fungsi DPPKB Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi DPPKB dalam pembangunan dapat lebih dirasakan manfaatnya
